

LEGAL MEMORANDUM PENGGUNAAN OBAT GOLONGAN II DAN III SECARA BEBAS OLEH ARTIS TORA SUDIRO

Moch. Ricardi Pratama Kusuma

(1287027)

ABSTRAK

Pemerintah Negara Indonesia berperan aktif dalam mengusahakan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Pengusahaan kesehatan bagi warga negara pada saat ini diutamakan dari usaha preventif yaitu pengawasan pencegahan penyalahgunaan peredaran obat. Pada kasus artis Tora Sudiro, terdapat hal yang menarik dalam penyalahgunaan obat dengan merek dagang Dumolid. Kasus Tora menunjukkan bahwa penyalahgunaan obat Dumolid bisa terjadi karena lemahnya pengawasan penegakan hukum kesehatan pada dokter, farmakologi dan apoteker. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian terhadap kasus Tora Sudiro agar terjadi perbaikan nyata bagi Undang-Undang Kesehatan dan Aturan Pelaksanaannya.

Legal Momerandum ini melalui metode yuridis normatif dan disusun secara sistematis dari mulai pencarian data kasus posisi yang dapat dipercaya, pengumpulan aturan-aturan hukum positif yang ada hingga landasan atau asas yang mempunyai korelasi terhadap kasus tersebut. Hal yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini yaitu apakah peraturan tentang perubahan zat yang terkandung dalam dumolid menjadi benzodiazepin ini sudah terlaksana dengan baik, bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap bahaya Dumolid, dan bagaimana antisipasi dan sosialisasi pemerintah agar tidak terjadi kembali kasus Tora Sudiro.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah akibat perubahan Obat Dumolid menjadi Kelas Benzodiazepin adalah terdapat perubahan perlakuan terhadap pemberian obat Dumolid yaitu harus melalui resep obat yang ditebus pada apotik tertentu. Peraturan atas perubahan Obat Dumolid menjadi Psikotropika golongan Benzodiazepin terdapat pada tingkat Nasional dan daerah, namun pengawasan penyalahgunaan obat Dumolid di tingkat daerah lemah karena hanya sebatas penyuluhan. Peran pemerintah atas perubahan ketentuan golongan obat seperti dalam kasus Tora Sudiro adalah sebagai pembina dan pengawas langsung bagi pelaksana pengaturan undang-undang psikotropika dan peraturan-peraturan perubahannya. Saran yang dapat diberikan penulis adalah bagi Dokter agar setiap memberikan resep maupun kopian resep obat harus berkoordinasi dengan BPOM agar pengawasan terhadap obat dan peredarannya menjadi lebih kuat. Bagi BPOM agar tidak hanya mengurus mengenai ijin-ijin administrative (apotik, obat, makanan) namun juga harus mengawasi peredaran obat dan resep serta kopian resep dari dokter, pemerintah (dalam hal ini BPOM) harus lebih memperketat ijin peredaran obat-obat psikotropika dan memperluas kewenangan BPOM untuk mengawasi peredaran obat semacam Dumolid.

Kata Kunci : Artis, Penyalahgunaan, Obat, Dumolid, Psikotropika

THE MEMORANDUM LEGAL ON THE ONE HAND THE USE OF A DRUG THE COMPANIONS OF THE II AND III IN A FREE MANNER BY AN ARTIST TORA SUDIRO

Moch. Ricardi Pratama Kusuma
(1287027)

ABSTRACT

The Indonesian state play an active role in trying to establish a health for the people of Indonesia. Operation health for the states at the time of this were selected from business preventive namely supervision prevention distribution drug abuse. In the case of artist Tora Sudiro, there are a fascinating drug abuse as to a trade mark Dumolid. The case of tora shows that a drug of abuse Dumolid occurred due to to the lack of supervision for the enforcement of the laws of health at doctor, of pharmacology and pharmacists. Hence, needed a research on cases tora sudiro may be clear to repair law health and the implementation arrangements.

This legal memorandum has arranged trough the normative and juridical method systematically, starting from the process of credible data mining, to collecting rules of positive law in order to create base for the case. Thing a point the focus on this research namely whether it is regulations on change substance which is contained in dumolid be benzodiazepine has been accomplished, how community knowledge to danger dumolid, and how anticipation and socialization the government to not reënacted cases tora sudiro.

Conclusions obtained from research is resulting from a change of Dumolid into grades benzodiazepine is there was a change in treatment of medicine giving dumolid namely must through redeemed prescription drugs in particular pharmacy. Regulations on changes in the benzodiazepine dumolid psychotropic medicine to exist at national and regional, but dumolid drug abuse supervision at the local level are only poor for counseling. The role of governments on the amendment of the provisions of the companions of the a drug as in the case of Tora Sudiro is individualas a propenent of the and inspector were directly implementers arrangement the act of psychotropic and the regulations concerning the transformation to be. A suggestion that is can be given writer is to doctors in order for any prescribes as well as drug recipe of copies have to coordinate with from food and medicine supervision that there is very little supervision over the member of a sedative and its course to its appointed become stronger. For BPOM that they should not only take care of administrative (pharmacies by about a seal of approval , a drug , food) but also must oversee the distribution of medicines and a prescription as well as of copies prescriptions of physicians , the government (in this case BPOM) have to tighten the permission the circulation and extending the authority bpom psychotropic drugs to surveillance on the drug a kind of Dumolid.

Key Word : artist , abuse , drug , dumolid , psychotropic.

DAFTAR ISI

Lembar Judul	
Pernyataan Keaslian.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Persetujuan Panitia Sidang.....	iii
Persetujuan Revisi	iv
Abstrak.....	v
Abstract.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Kasus Posisi.....	9
C. Permasalahan Hukum.....	11
D. Pemeriksaan Dokumen.....	12
BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN	
A. Peraturan Perundang-undangan.....	16
B. Kasus Penyalahgunaan Obat.....	21
1. Kasus Narkotika dan Prekursok Narkotika yang berhasil diungkap BNN.....	21
2. Jumlah Tersangka Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berhasil diungkap BNN Tahun 2012-2016.....	22

3. Penyalahgunaan Narkoba Menurut Zat yang Digunakan.....23

BAB III TINJAUAN TEORITIK.....24

A. Teori Hukum Kesehatan.....24

1. Pengertian Hukum Kesehatan, Subjek Hukum Kesehatan, Asas Hukum Kesehatan dan Sumber Hukum Kesehatan.....24

2. Perjanjian Antara Pasien Dengan Dokter38

B. Peraturan Penggunaan Obat dan Pendistribusian Obat Menurut Hukum Positif.....47

C. Hubungan Farmokologi Dengan Dokter..... 57

D. Pengaturan Rehabilitasi Menurut Hukum Positif.....60

BAB IV ANALISA HUKUM ATAS PENDAPAT-PENDAPAT HUKUM TERHADAP KASUS TORA SUDIRO.....64

A. Apa yang mendasari pemerintah mengeluarkan aturan perubahan golongan obat dumolid menjadi golongan Benzodiazepin64

B. Apa sanksi yang diberikan kepada pengedar dan distributor yang melakukan pelanggaran terhadap peredaran obat dumolid71

C. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap perubahan dumolid menjadi golongan benzodiazepin sehingga dapat meminimalisasi seperti kasus Tora Sudiro78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	84
Daftar Pustaka.....	85

